

**PELAKSANAAN KADERISASI PEREMPUAN PARTAI GERINDRA KOTA  
PEKANBARU TAHUN 2014-2019**

**Oleh : Rizkia Krizma Cahya Ramadhani**  
**Email : rizkiakrsm@gmail.com**

**Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si**  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax 1761-63277

**ABSTRACT**

*Gerinda party is a new party which, according to its development in a short time, has management at all levels, both provincial and district/city to sub-district and village levels. at this time all parties including gerindra are faced with various problems regarding the problem of a weak recruitment system, an ineffective regeneration system, resulting in the lack of representation of women sitting in the legislature. the cadre of women in political parties is an important issue, because every political party, both in the management structure and in the nomination of legislative candidates, must place thirty percent (30%) of women's representation.*

*The purpose of this study was to determine the implementation of the female cadre of the gerindra party in pekanbaru city in 2014-2019. the research method used in this research is descriptive qualitative with interview and documentation data collection techniques.*

*The results of this study indicate that the implementation of the female cadre of the gerindra party in pekanbaru city in 2014-2019 was carried out in two stages: first, cadreization education and training, second, advanced cadreization. the regeneration process for the dpc gerindra party in pekanbaru city is carried out in stages with three categories, namely driving cadres, middle cadres and young cadres. barriers to the implementation of the female cadre of the gerindra party in pekanbaru city in 2014-2019, among others, are the lack of interest in women in the world of politics and supported by public perceptions that tend to be biased towards limiting the role of women in household matters, so that the majority of votes in the general election are won by men. -male.*

***keywords: implementation of women's cadre, elections, political parties***

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara pada hakikatnya bersifat gerindrais, memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan. Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa: segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal ini jelas bahwasanya perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan hak dan kewajiban sedikitpun yang diatur dalam undang-undang dasar. Karena baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama warga negara seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Termasuk diantaranya adalah hak dalam hal berpolitik, baik laki-laki maupun perempuan juga sama kedudukannya. Meskipun demikian partisipasi kaum perempuan di Indonesia masih sangat kecil, terbukti dari sejak pertama kali diadakan pemilu tahun 1955 hingga yang terakhir tahun 2019 keterwakilan perempuan dilegislatif belum pernah mencapai angka 20%.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik pada era reformasi sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat terutama sejak lahirnya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Partai Politik yang memberikan ruang terbuka bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Tuntutan keterlibatan atau keterwakilan perempuan politik didasari oleh argument bahwa: pertama, untuk memperjuangkan kepentingan perempuan mempengaruhi kebijakan pemerintah maka harus dimulai dengan duduknya perempuan dalam jabatan politik. Kedua, kewajaran keterwakilan perempuan dalam jabatan politik (legislatif dan partai politik) didasari oleh jumlah perempuan yang lebih besar dari jumlah laki-laki.

Jumlah calon legislatif perempuan Kota Pekanbaru periode 2014-2019 mengalami kenaikan. Khususnya partai Gerindra mengalami kenaikan sebanyak 1 orang, dan yang lebih dominan adalah partai PKPI dengan jumlah kenaikan sebanyak 3 orang. Sementara itu untuk partai Demokrat, PAN, dan Hanura, tidak terlihat adanya penambahan ataupun pengurangan calon legislatif perempuan periode 2014-2019.

Sebagaimana dipahami, bahwa partai politik merupakan wadah organisasi yang penting bagi suatu negara, apalagi negara yang menganut sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kebijakan publik. Di samping itu partai politik juga sebagai kendaraan untuk mempersiapkan kader-kader terpilih untuk duduk di kursi kepemimpinan.

Dalam rangka menyiapkan calon-calon yang berkualitas inilah maka kader harus melewati proses kaderisasi. Prinsip dasar aktivitas partai adalah memilih calon untuk duduk di parlemen dan memilih calon untuk jabatan eksekutif seperti presiden, gubernur, dan kepala daerah/walikota. Menentukan calon biasanya partai melihat dari suara polling, serta dedikasi calon terhadap partai.

Fungsi rekrutmen (pengkaderan) sebagai salah satu dari bagian dari partai politik merupakan bagian yang sangat penting. Fungsi rekrutmen itu sendiri bertujuan untuk menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk ditempatkan di lembaga-lembaga legislatif seperti DPR maupun DPRD. Setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian, partai politik dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.

Proses pengkaderan itu sendiri merupakan proses penyiapan sumber daya manusia untuk kelak mereka menjadi pemimpin yang dapat membangun dan

menjalankan fungsi organisasi dengan baik. Dalam proses kaderisasi tersebut terdapat 2 persoalan penting:

1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun kemampuan.
2. Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumber daya manusia untuk organisasi terutama dikhususkan untuk kaum muda.

Seorang kader dalam sebuah organisasi merupakan individu yang telah dilatih dan dipersiapkan sehingga dia memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang awam. Oleh karena itu, apabila sebuah organisasi telah melakukan pelatihan-pelatihan, namun para anggotanya tidak menunjukkan kelebihan dibandingkan dengan orang-orang umum, maka proses kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Jadi secara sederhana proses pengkaderan tersebut telah menyalahi dari konsep yang seharusnya, dimana proses kaderisasi itu bertujuan untuk mencetak individu-individu yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak yang melebihi orang-orang awam pada umumnya.

Fungsi kaderisasi atau pencetakan calon pemimpin tidak terlepas dari penanaman etika-etika politik. Kaderisasi merupakan salah satu media rekrutmen, pematapan komitmen dan penguatan terhadap ideologi politik. Proses kaderisasi sebagai penguatan kelembagaan partai merupakan sebuah orientasi jangka panjang. Sehingga proses kaderisasi tersebut harus secara terus menerus dilakukan untuk memperkuat ikatan dalam partai politik tersebut. Perjalanan partai politik sebagai agen pencerahan, seharusnya dapat membawa perubahan yang berarti dalam sebuah sistem politik.

Pada saat ini partai politik dihadapkan dengan berbagai permasalahan

menyangkut tentang masalah lemahnya sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang tidak efektif, sehingga menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan yang duduk dilembaga legislatif pada saat pesta demokrasi lima tahun sekali. Kaderisasi perempuan di partai politik merupakan sebuah persoalan yang penting, karena di dalam setiap partai politik baik itu dalam struktur kepengurusan maupun dalam pengajuan calon legislatif harus menempatkan tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 Pasal 2 ayat 2 Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dalam melakukan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik hanya melakukan proses perekrutan hanya pada saat mendekati pemilihan saja.

Hal ini menyebabkan timbulnya kader-kader instan yang tidak kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya ketika kader tersebut menduduki jabatan-jabatan politik. Idealnya sebuah partai politik dalam melakukan perekrutan terhadap anggota, hendaknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum mendekati pemilihan. Hal ini akan memberikan waktu kepada partai politik untuk melatih anggota anggota partainya dengan baik sehingga anggota-anggota yang mengikuti proses kaderisasi tersebut akan menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program kerja partai.

Partai politik tanpa kaderisasi tidak akan berarti apa-apa. Setiap partai politik harus memiliki sistem kaderisasi yang baik. Sistem kaderisasi yang baik didapatkan apabila setiap pihak yang terkait berkerja sama dalam membentuk pola kaderisasi. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antar pihak yang melakukan pengkaderan dan anggota-anggota baru yang akan bergabung

maupun faktor lainnya seperti halnya materi-materi yang membentuk pola berfikir dan berkerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai yang bersangkutan. Apabila sebuah partai politik berhasil dalam membentuk kader-kader yang berkualitas, maka partai politik tersebut juga dapat menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas juga.

Apabila proses kaderisasi ini gagal maka, transfer kepemimpinan dari generasi tua menuju generasi muda akan terhambat. Hambatan dalam proses kaderisasi ini akan menciptakan sebuah kekecewaan. Kekecewaan ini salah satunya diwujudkan dengan membentuk partai politik baru dengan berbagai macam visi dan misi yang selalu mengumandangkan pembangunan.

Dalam kancah perpolitikan, Partai Gerindra merupakan sebuah partai baru. Dalam perkembangannya sebagai partai politik baru dalam waktu yang singkat partai Gerindra memiliki kepengurusan di semua tingkatan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan dan Kelurahan. Hal inilah yang menjadikan partai Gerindra merupakan satu-satunya partai baru yang menjadi peserta Pemilu 2009. Sebagai partai politik baru, Partai Gerindra akan menghadapi beberapa permasalahan seperti susahny merekrut calon kader perempuan untuk dimasukan ke dalam struktur organisasi maupun di dalam Pencalonan Anggota Legislatif.

Rekrutmen politik dan kaderisasi menjadi dua agenda penting bagi partai politik. Proses rekrutmen partai politik merupakan modal dasar bagi partai politik untuk menempatkan kader-kadernya dalam jabatan politik itu, idealnya suatu partai politik melakukan rekrutmen kader dan calon anggota legislatif jauh-jauh hari sebelum helat politik dilangsungkan.

Tujuannya sederhana yaitu untuk mempersiapkan kader-kader rekrutan tersebut dengan kemampuan yang mempuni

untuk bersaing dengan kader-kader politik dari partai lain dan memiliki kemampuan dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban ketika terpilih dalam kompetisi politik tersebut. Sementara kaderisasi adalah bagian dari proses rekrutmen dimana adanya proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi partai secara lebih baik dan kaderisasi ini dilakukan secara berjenang dan sistematis.

Kriteria pengrekrutan kader partai gerindra terdiri dari :

1. Mental dan Ideologi
2. Penghayatan Visi dan Misi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta manifesto perjuangan partai
3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela
4. Kepemimpinan
5. Militansi dan mandiri

Pada periode 2014-2019, partai Gerindra menjadi salah satu partai yang memperoleh suara paling banyak dari pada partai lainnya dengan jumlah 68.230 suara. Sementara jumlah perolehan kursi terbanyak dipegang oleh partai PKS dengan jumlah 8 kursi.

Jumlah perolehan suara dari partai Gerindra adalah sebanyak 68.230. Jumlah ini diketahui lebih tinggi dari partai lainnya. Posisi perolehan suara tertinggi kedua setelah partai Gerindra yaitu partai PKS 66.443 suara. Sedangkan untuk posisi perolehan suara paling rendah yaitu partai PKPI sebanyak 960 suara.

Jumlah Calon Legislatif dari Partai Gerindra Kota Pekanbaru Perdapil Tahun 2014 dan 2019 masih sama yakni sebanyak 45 orang. Hanya saja perbedaannya di tahun 2014 hanya terdapat sebanyak 5 dapil sedangkan di tahun 2019 terdapat sebanyak 6 dapil.

Data perbandingan antara caleg laki-laki dan caleg perempuan terpilih diambil perbandingan berdasarkan keseluruhan caleg menurut jenis kelamin. Penambahan anggota legislatif pada kaum perempuan di Partai Gerindra dari tahun 2014 ke 2019 yakni sebanyak 1 orang. Sedangkan terdapat

pengurangan dari kaum laki-laki dari tahun 2014 ke 2019 sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam dunia pengkaderisasian.

Sebagai partai politik baru, Partai Gerindra harus dapat mencari kader-kader perempuan yang tepat dan berkualitas, sehingga pada saat Pemilihan Umum Legislatif mereka siap bertarung menyaingi Calon Legislatif laki-laki. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari bagaimana Kaderisasi Perempuan yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk mencetak kader-kader yang berkualitas. Untuk itulah penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kaderisasi Perempuan Partai Gerindra Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Rekrutmen Politik**

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik Negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Dalam hal ini, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada jabatan sesuai atau tidak. Ini semua sangat bergantung pada pola-pola atau mekanisme rekrutmen yang digunakan.

Menurut Mardianto rekrutmen diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi

dan kebutuhan suatu organisasi/perusahaan. Menurut Rivai, rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia (karyawan) yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Sedangkan politik menurut Budiarjo adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.

Menurut Afan Gafar, rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah Negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Czudnowski dalam (Sigit Pamungkas, 2011) mengartikan politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Lebih jauh Gabriel Almond dalam (Lily Romli, 2005) mengartikan fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

### **Kader**

Kader dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang-orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan-pekerjaan penting dalam pemerintah, partai (instansi atau organisasi) dll. Kata kader berasal dari bahasa Prancis yaitu *Cadre* yang memiliki makna bagian inti tetap dari suatu resimen kelompok elit yang terpilih karena terlatih dengan baik.

Istilah kader seringkali dihubungkan dengan anggota sebuah organisasi atau persyarikatan, baik yang bersifat sosial keagamaan, maupun yang bersifat politik. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kader adalah orang yang diharapkan akan

memegang peranan penting pada pemerintah, partai dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kader memiliki cakupan makna yang sangat luas. Selain itu kader juga akan diposisikan sebagai calon penerus yang akan melanjutkan estafed dari sebuah kepemimpinan suatu organisasi.

Oleh karena itu adanya kader dalam sebuah organisasi atau persyarikatan itu menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Demi menciptakan sukses dan regenerasi kepemimpinan secara lancar dan berkesinambungan, sangat dibutuhkan tersedianya kader-kader pemimpin yang representative untuk ditampilkan.

Kader merupakan orang yang mampu menjalankan amanat, orang yang memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk memajemen langsung suatu organisasi. Menurut Masdar Hekmi dan Fayol dalam Farid, kader diartikan sebagai para pendukung dan pelaksana cita-cita yang cakap sedangkan pembentukan kader disebut juga sebagai pendidikan dan pengembangan tenaga-tenaga yang akan disertai tugas kepemimpinan di kemudian hari.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kader adalah kumpulan orang yang dibina oleh suatu organisasi dengan harapan kader tersebut kelak dapat meneruskan kepemimpinan atau kepemimpinan organisasi tersebut.

### **Kaderisasi**

Kaderisasi secara terminologi dapat diartikan sebagai proses pencetakan kader. Kaderisasi berasal dari kata “kader” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang diharapkan atau dipersiapkan untuk dapat memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintah, partai, dan sebagainya.

Kaderisasi adalah proses pencarian bibit-bibit unggul dari anggota partai politik melalui kegiatan sistematis, berkelanjutan dan terarah berkaitan dengan senang hati

akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi.

Pandangan umum mengenai kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua unsur secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek) dan yang kedua, sasaran kaderisasi (obyek). Pertama, subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Sifat sebagai subyek dan obyek dari proses kaderisasi ini sejatinya harus memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader organisasi yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis.

Sebagai obyek dari proses kaderisasi, sejatinya seorang kader memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melanjutkan visi dan misi organisasi ke depan. Karena jatuh bangunnya organisasi terletak pada sejauh mana komitmen dan keterlibatan mereka secara intens dalam dinamika organisasi, dan tanggung jawab mereka untuk melanjutkan perjuangan organisasi yang telah dirintis dan dilakukan oleh orang-orang sebelumnya.

### **Partai Politik**

Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan secara keikutsertaan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dengan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifest dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam

proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di Negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang bisa dijumpai.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini mencakup memilih dalam pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip dalam Miriam Budiardjo adalah sebagai berikut :

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a*

*government, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

Kemudian Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut : Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of government policy power, and who complete for popular support with other group holding divergent view*).

Menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 Fungsi Partai Politik.

Dari berbagai penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

### **Perempuan dalam Partai Politik**

Menurut Rosenau, keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu :

- a) Peluang resmi yang artinya kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara.
- b) Sumber daya sosial artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis dalam kenyataannya tidak semua memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik berkaitan dengan geografis terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama dll.
- c) Motifasi personal artinya motif mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi motif ini bisa sengaja atau tidak sengaja, rasional atau tidak rasional, di ilhami psikologis atau sosial, diarah dari dalam diri sendiri atau diri luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

Maka dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dapat diartikan sebagai peluang suka rela yang bisa berbentuk konvensional dan bisa juga non-konvensional, yang di pengaruhi apakah perempuan tersebut diberikan kesempatan ikut serta dalam berpolitik.

Hak konstitusi warga Negara Indonesia yang merupakan hak asasi manusia yang telah dikordinasi secara jelas dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai dasar hukum tertinggi tentu saja aturan ini melindungi segala perundang-undangan di bawahnya.

Keterlibatan kader atau anggota di dalam partai merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri baik menjadi eksekutif maupun menjadi legislatif. Penempatan posisi perempuan dalam struktur kepengurusan perempuan dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat dimana posisi perempuan ditempatkan di wilayah domestik sedangkan

laki-laki cenderung di wilayah publik, kurangnya keterlibatan perempuan untuk menyuarkan aspirasi menjadi salah satu penyebab mengapa kader perempuan di DPC Partai Gerindra sangat minim.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan penelitian kualitatif, yang menekankan pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara, menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Dokumentasi, Menurut Pohan dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **Teknik Analisa Data**

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Menurut Miles dan Huberman analisis digambarkan menjadi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun jenis data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam kancah perpolitikan, Partai Gerindra merupakan sebuah partai baru. Berdasarkan perkembangannya sebagai partai politik baru dalam waktu yang singkat partai Gerindra memiliki kepengurusan di semua tingkatan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan dan Kelurahan. Hal inilah yang menjadikan partai Gerindra merupakan satu-satunya partai baru yang menjadi peserta Pemilu 2009. Sebagai partai politik baru, Partai Gerindra menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya yaitu susahny merekrut calon kader perempuan untuk dimasukkan ke dalam struktur organisasi maupun di dalam Pencalonan Anggota Legislatif.

Sementara itu Hj. Sri Rubiyanti, S.IP selaku Sekretaris Fraksi Gerindra Kota Pekanbaru mengatakan :

*“Keterlibatan perempuan distruktur Partai Gerindra sangat dibutuhkan dan kiprah perempuan dapat memberikan motivasi kepada jajaran pengurus lainnya karena fungsi di Partai sendiri mengharuskan adanya pengurus perempuan mengingat adanya urusan-urusan keterwakilan perempuan di dalam Partai, bahkan bisa juga menduduki beberapa kepengurusan di dalam sayap Partai Gerindra” (Wawancara 03 Mei 2021).*

Pelaksanaan kaderisasi merupakan agenda tahunan dari DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan selama kurang lebih 3 hari dua malam untuk dapat menentukan siapa yang akan dipilih sebagai kader dari DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru, antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan proses maupun tahap pengkaderan, artinya setiap individu diberlakukan sama baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu R.A Dwiyanti selaku Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru :

*“Secara struktural antara perempuan dan laki-laki di Partai Gerindra Kota Pekanbaru tidak ada perbedaan, porsi keterlibatan perempuan di dalam struktural Partai Gerindra dari tingkat bawah hingga ke pusat, perempuan memiliki porsi minimal 30%” (Wawancara 03 Mei 2021).*

Pernyataan di atas sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 Pasal 2 ayat 2 Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Esweli, MH selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru, proses pelaksanaan kaderisasi pada DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019, antara lain yakni sebagai berikut:

*“DPC meminta daftar nama kader dari pengurus tingkat Kelurahan, Kecamatan yang bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan kader yang dilaksanakan oleh DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru. Setiap pengurus Kelurahan dan Kecamatan yang belum mengikuti*

*kaderisasi diwajibkan mengikuti pelatihan dan pendidikan kaderisasi yang dilaksanakan oleh DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru. Pendidikan ini dilaksanakan di Basecamp Rumbai tempat pelatihan security, dan selama proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini seluruh peserta tidak diperbolehkan keluar dari lokasi pendidikan” (Wawancara 20 Juli 2020).*

Kaderisasi bagi parta politik merupakan upaya yang penting, karena setiap partai harus mempersiapkan dan membina para kader untuk menjadi anggota partai yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kecakapan berorganisasi yang optimal. Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada seorang kader. Kaderisasi merupakan hal yang fundamental untuk mempertahankan eksistensi sebuah partai politik. Kaderisasi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah regenerasi. Dari hasil wawancara oleh Bapak Esweli, MH di atas, diketahui bahwa pelaksanaan kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru dilakukan dengan proses yang bertumpu pada pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan tersebut ditujukan kepada pengurus tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Proses pelaksanaan kaderisasi ini dilaksanakan selama tiga (3) hari dua (2) malam yang bertepatan di *basecamp* Rumbai tempat pelatihan *security*. Selama masa pelatihan, Bapak Esweli, MH mengatakan bahwa setiap peserta tidak diperbolehkan keluar atau meninggalkan lokasi pendidikan.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kaderisasi pada DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara Bapak Esweli, MH selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru yakni sebagai berikut :

*“Satu Kelurahan mengirimkan minimal 10 orang, sedangkan Kecamatan*

*sebanyak 5 orang kader untuk diseleksi mengikuti pendidikan dan pelatihan kader. Daftar nama yang dikirim oleh pimpinan ranting (Kelurahan) dan Kecamatan di seleksi oleh panitia pelaksanaan pelatihan kaderisasi. Dari 15 orang daftar nama yang dikirim oleh pengurus Kelurahan dan Kecamatan hanya diambil 5 orang untuk mengikuti kaderisasi. Satu hari sebelum pelaksanaan kaderisasi seluruh peserta sudah berada dilokasi DIKLAT paling lambat pukul 22.00 WIB. Hari berikutnya dilaksanakan pembukaan DIKLAT kaderisasi oleh ketua DPD Parta Gerindra Provinsi Riau. Hari ke 3 merupakan hari terakhir, disinilah saat yang menegangkan, seluruh kader diumumkan lolos atau tidak lolosnya peserta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi ini. Setelah diumumkan peserta yang lolos dilanjutkan dengan acara penutupan” (Wawancara 20 Juli 2020).*

Pelaksanaan kegiatan kaderisasi merupakan landasan bagi kader untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Esweli di atas maka pelaksanaan kaderisasi pada DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru dapat diorganisir yakni sebagai berikut :

#### **1. Pendidikan dan Pelatihan Kaderisasi**

Kurangnya intensitas pendidikan politik dapat membawa pengaruh besar terhadap eksistensi partai di tengah masyarakat karena pendidikan politik dilakukan untuk mengembangkan kader agar lebih militan dan loyal terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kaderisasi tidak semata-mata dilakukan dengan mudah dan instan. Pelaksanaan kaderisasi perlu dilakukan dengan teliti dan cermat serta adil kepada seluruh peserta. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Esweli, MH selaku Ketua DPC Partai

Gerindra Kota Pekanbaru, yang mana dikatakan bahwa untuk menentukan kader yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif, pihak DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru perlu mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada para peserta.

Satu hari sebelum pelaksanaan kaderisasi seluruh peserta akan berada dilokasi diklat. Diklat merupakan salah satu bagian penting dari proses kaderisasi yang turut menentukan kapasitas dan kemampuan kader. Pada dasarnya diklat dilakukan secara berkala minimal setahun sekali. Setiap diklat itu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu tahap saja. Pembukaan diklat diresmikan oleh ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau.

Setelah menjalani 3 hari masa pelatihan, tibalah disaat yang menegangkan, dimana seluruh peserta akan diumumkan lolos atau tidaknya untuk dipercayakan sebagai kader DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru.

## 2. Kaderisasi Lanjutan

Kaderisasi Lanjutan merupakan salah satu syarat yang mutlak dilakukan dalam merekrut anggota organisasi atau partai politik. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi tahun 2014-2019 pada DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru diambil dari sepuluh (10) orang pengurus tingkat Kelurahan (Pimpinan Ranting) dan lima (5) orang dari tingkat Kecamatan, total peserta pelatihan dan pendidikan kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru ini berjumlah sebanyak lima belas (15) orang. Dari 15 orang peserta tersebut, yang akan diambil untuk mengikuti kaderisasi hanya sebanyak 5 orang, sedangkan sisanya sebanyak 10 orang dinyatakan gagal dalam proses seleksi.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah

organisasi, oleh karena itu setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan kaderisasi perlu diseleksi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai kader DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru.

Kaderisasi merupakan kebutuhan proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang Tangguh yang memiliki potensi dan mampu menarik simpati masyarakat. Kader-kader yang Tangguh inilah yang akan melanjutkan gerakan-gerakan politik suatu partai, sehingga partai akan terus berjalan dan berkembang dengan ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kaderisasi, diharapkan suatu organisasi akan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak bersifat ad-hoc dalam mengemban visi dan melaksanakan misinya. Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai.

Potensi yang harus dimiliki bagi setiap kader di DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru menurut hasil wawancara Bapak Esweli, MH selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru antara lain yaitu :

- a. Mudah bersosialisasi dengan masyarakat
- b. Menjadi *public figure* yang baik, dan
- c. Memiliki pendanaan yang cukup untuk mengikuti pemilu legislatif.

Potensi tersebut dapat dilihat seiring berjalannya proses kaderisasi. Proses kaderisasi adalah kegiatan yang berisi upaya-upaya mendukung bagi terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan menggerakkan oranglain secara intensif sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, dari proses kaderisasi inilah yang akan melahirkan kader-kader yang

berpotensi tinggi dan memiliki kemampuan yang bagus dalam mengelola sebuah partai.

Adapun proses kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru pada Tahun 2014-2019 dilakukan secara berjenjang dengan tiga (3) kategori, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drs. Esweli, MH selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru :

1. Kader penggerak, diambil dari pengurus tingkat ranting atau pengurus Partai Gerindra ditingkat Kelurahan yang pelaksanaan pengkaderannya dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota atau Kabupaten Partai Gerindra.
2. Kader Madya, diambil dari pengurus Kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang pelaksanaan pengkaderannya dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota atau Kabupaten Partai Gerindra.
3. Kader Muda, diambil dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau dari sayap Partai Gerindra yang pelaksanaan pengkaderannya dilaksanakan oleh tingkat DPP atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Sementara bentuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam proses kaderisasi tersebut antara lain :

1. Olahraga, ke Agamaan (ke Rohanian)
2. Kegiatan Pelatihan Baris Berbaris (PBB)
3. Kedisiplinan
4. Manifesto Perjuangan Partai Gerindra
5. Cinta NKRI dengan menanamkan jiwa korsa dan cinta tanah air kepada seluruh kader yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta menanamkan rasa cinta mereka kepada Partai Gerindra.

Perlu diketahui bahwa Partai Gerindra memiliki beberapa manifesto dalam proses kaderisasi, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Esweli, MH selaku

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru yakni sebagai berikut :

- 1) Membangun ekonomi yang kuat, berdaulat adil dan Makmur
- 2) Melaksanakan ekonomi kerakyatan
- 3) Membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air
- 4) Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta olahraga
- 5) Membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup
- 6) Membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.

Pelaksanaan kegiatan kaderisasi sangat berguna bagi kader karena setiap kader akan mendapatkan ilmu kepemimpinan dan materi tentang kepartaian Gerindra, wawasan Nusantara, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Partai Politik. Selain itu berhasil atau tidaknya kader dalam perolehan suara tergantung dari tiga (3) hal ini yakni :

- 1) Popularitas  
Popularitas adalah tingkat keterkenalan kader di mata publik. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya efektivitas sehingga layak dipilih tetapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih.
- 2) Finansial  
Selain modal popularitas, kekuatan finansial juga yang menunjang untuk meningkatkan efektivitas. Dalam hal ini Gerindra akan menanyakan kemampuan finansial para bakal calon legislatif (bacaleg) agar nanti saat duduk di kursi DPR tidak menjadikan DPR sebagai tempat mencari nafkah dan kemampuan finansial ini juga dibutuhkan untuk kelancaran caleg dalam pemilihan.

### 3) Pengalaman Organisasi

Banyaknya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh bakal calon legislatif (bacaleg) akan sangat berpengaruh terhadap jiwa kepemimpinan, dan pengambilan keputusan terutama saat menjadi anggota DPRD. Kemudian dari pengalaman organisasi yang dimiliki tentu akan berpengaruh pada efektifitas calon legislatif tersebut (Wawancara dengan Bapak Boyke Amri, SH selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru).

Melalui tiga pertimbangan di atas, kerap sekali membuat para perempuan mengurungkan niat untuk menjadi anggota legislatif. Dilihat dari popularitas, finansial dan pengalaman organisasinya, perempuan dinyatakan lebih sedikit memiliki minat untuk bergabung dalam dunia politik. Sehingga kebanyakan yang berhasil duduk dikursi legislatif dari DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru adalah laki-laki.

### **Hambatan Pelaksanaan Kaderisasi Perempuan Partai Gerindra Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019**

Rendahnya partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif saat ini masih menjadi isu kebijakan nasional. Perbedaan gender dalam sistem politik yang ditandai dengan adanya pengucilan (*exclusion*) perempuan oleh ideologi, bentuk struktur kekuasaan dan kapasitas, mobilitas, marjinalisasi perempuan dalam proses politik dan rendahnya partisipasi perempuan akan hak-hak terlibat dalam politik dan lembaga politik formal menyebabkan masih terjadinya kesenjangan gender dibidang politik. Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu masih berada di bawah proporsi (*under represented*) mengindikasikan bahwa keterwakilan

perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Hal ini akan berdampak pada minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Pada dasarnya faktor-faktor penghambat dalam mengikuti pemilu legislatif secara umum adalah popularitas dan memiliki modal sosial yang cukup atau tidak, hal ini sama-sama penting bagi perempuan maupun laki-laki, akan tetapi ada faktor lain yang mungkin hanya menjadi hambatan bagi perempuan sementara tidak bagi laki-laki, seperti masih banyak berkembangnya stereotip di masyarakat bahwa perempuan belum pantas naik panggung untuk wilayah publik terlebih lagi wilayah politik yang didominasi oleh laki-laki. Hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sedikitnya minat bagi perempuan untuk mengikuti kaderisasi.

Hambatan pelaksanaan kaderisasi perempuan Partai Gerindra Kota Pekanbaru tahun 2014-2019 adalah masih minimnya minat perempuan dalam dunia politik serta didukung persepsi masyarakat yang cenderung masih bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga, sehingga perolehan suara dalam pemilu lebih banyak dimenangkan oleh laki-laki. Penulis berasumsi bahwa hambatan ini tidak hanya dirasakan oleh Partai Gerindra saja, melainkan juga untuk Partai-Partai lainnya.

Ibu R.A Dwiyanti, NA selaku Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru mengatakan bahwa faktor yang menjadi hambatan bagi kader perempuan dalam pelaksanaan kaderisasi adalah dukungan keluarga yang belum siap. Ibu Hj. Sri Rubiyanti, S.IP selaku Sekretaris Fraksi Gerindra Kota Pekanbaru menambahkan bahwa yang menjadi hambatan biasanya adalah waktu atau tingkat kehadiran rapat-rapat partai karena fungsi perempuan sendiri sebagai ibu rumah tangga juga menjadi anggota DPRD yang juga sibuk (wawancara 03 Mei 2021).

Di negara yang menganut sistem patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya hambatan tersebut, antara lain yaitu : Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih kental asas patriarkalnya. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Ketiga berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam perlemen. Keempat tidak adanya jaringan antar organisasi massa, dan selebihnya adalah faktor-faktor seperti pendidikan, pengaruh keluarga dan sistem multi partai.

Untuk mengatasi hambatan yang telah penulis paparkan, ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru mengatakan sebagai berikut :

*“Untuk ke depannya kita akan memberikan motivasi kepada seluruh kader perempuan supaya mereka mau mengikuti pendidikan dan pelatihan kader, kita juga tidak akan memberikan pendidikan dan pelatihan seberat peserta laki-laki. Sementara itu untuk masyarakat, kita akan memberikan pendidikan sadar gender, supaya stereotip masyarakat terhadap perempuan dapat berubah dan pada akhirnya dapat meningkatkan minat perempuan dalam dunia politik”* (Wawancara 20 Juli 2020).

Berhubungan dengan hasil wawancara di atas, Bapak Boyke Amri, SH selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru menuturkan bahwa :

*“Selagi perempuan itu diperkirakan bisa meraup suara banyak, kita akan terus memberikan upaya-upaya untuk membantu mereka dalam memenangkan suaranya”* (Wawancara dengan Bapak

*Boyke Amri, SH selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru).*

Memberikan motivasi merupakan cara terbaik bagi DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru untuk menumbuhkan minat perempuan dalam dunia politik. Selain motivasi untuk calon legislatif perempuan, masyarakat juga akan ikut disertakan untuk membangun minat tersebut, yakni dengan memberikan pendidikan sadar gender supaya stereotip masyarakat terhadap perempuan dapat berubah. Stereotip didasarkan pada gambaran-gambaran yang sangat disederhanakan mengenai seluruh kelompok masyarakat, hematnya stereotip adalah gambaran umum yang dibentuk secara subjektif dan dibenarkan oleh masyarakat sehingga menjadi suatu kebenaran umum. Sebagaimana diketahui bahwa persepsi masyarakat saat ini cenderung masih bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga, oleh karena itu masyarakat perlu diberikan pendidikan supaya stereotip tersebut dapat berubah dan pada akhirnya peningkatan minat perempuan dalam dunia politik dapat berkembang.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan kaderisasi merupakan agenda tahunan dari DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan selama tiga (3) hari dua (2) malam. Dalam pelaksanaan kaderisasi ini antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan proses maupun tahap pengkaderan, artinya setiap individu diberlakukan sama.

Pelaksanaan kaderisasi bertumpu pada pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan tersebut ditujukan kepada pengurus tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan di *basecamp* Rumbai tempat pelatihan security. Pesertanya diambil dari sepuluh (10) orang pengurus tingkat Kelurahan (Pimpinan Ranting) dan

lima (5) orang dari tingkat Kecamatan, total peserta pelatihan dan pendidikan kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru ini berjumlah sebanyak lima belas (15) orang. Dari 15 orang peserta tersebut, yang akan diambil untuk mengikuti kaderisasi hanya sebanyak 5 orang, sedangkan sisanya sebanyak 10 orang dinyatakan gagal dalam proses seleksi.

Proses kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru pada tahun 2014-2019 dilakukan secara berjenjang dengan tiga kategori, yakni : Kader Penggerak, diambil dari pengurus tingkat ranting atau pengurus Partai Gerindra ditingkat Kelurahan. Kader Madya, diambil dari pengurus tingkat Kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang (PAC). Dan Kader Muda, diambil dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari Sayap Partai Gerindra.

Hambatan pelaksanaan kaderisasi perempuan Partai Gerindra Kota Pekanbaru tahun 2014-2019 adalah masih minimnya minat perempuan dalam dunia politik serta didukung persepsi masyarakat yang cenderung masih bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga, sehingga perolehan suara dalam pemilu lebih banyak dimenangkan oleh laki-laki. faktor yang menyebabkan munculnya hambatan tersebut, antara lain yaitu : Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih kental asas patriarkalnya. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Ketiga berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam perlemen. Keempat tidak adanya jaringan antar organisasi massa, dan selebihnya adalah faktor-faktor seperti pendidikan, pengaruh keluarga dan sistem multi partai.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Kepada DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kaderisasi, serta memperhatikan sistem pengkaderan sejak dini dalam memilih kader-kader muda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama kepada kader perempuan.
2. DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru diharapkan dapat memperkenalkan para kader-kadernya baik laki-laki maupun perempuan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal sosok seorang kader yang akan dipilihnya nanti serta memperkenalkan eksistensi partai sampai ke pelosok daerah dengan cara melakukan kegiatan sosial yang lebih banyak.
3. DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru diharapkan mampu memberikan motivasi dan pendidikan yang superaktif kepada perempuan dan masyarakat agar stereotip mengenai perempuan dalam dunia politik dapat berubah sehingga minat perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik jadi semakin bertambah.
4. Setiap perempuan yang memiliki minat dan yang sudah berkecimpung dalam dunia politik hendaknya membangun sebuah jaringan yang bertujuan menumbuhkan motivasi kepada perempuan lainnya.
5. Kepada masyarakat diharapkan dapat mengikuti pendidikan sadar gender yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru serta rutin dalam memantau perkembangan media

mengenai eksistensi wanita dalam ranah politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adjiwicaksana.2004. *Sistem Kaderisasi Organisasi*. Jakarta : UI Press

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Politik: Sejarah Bahasa Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Bungin, Burhan.2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group

\_\_\_\_\_, Miriam. 2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka

Daryanto dan Farid, Muhammad.2013. *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Nasional*. Yogyakarta : Gava Media

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI Pres

Kamisa.1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika

Mardianto, Adi. 2014. *Management Recruitmen*. Jakarta: Pinasthika Publisher

Nawawi. 2011.*Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajahmada University Press

Prastowo, Andi.2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*.Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Sangadji, Etta Mamang.2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Surbakti, Ramlam. 2010.*Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2010

Syahza, Almasdi.2014. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru : UR Pres

### Internet :

Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011.

Partai Gerindra, “Anggaran Dasar Partai Gerindra”, diakses dari:<http://partaigerindra.or.id/ad-art-partai-gerindra>, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 12.45

Partai Gerindra, “Anggaran Dasar Partai Gerindra”, diakses dari:<http://partaigerindra.or.id/ad-art-partai-gerindra>, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 12.45

### Jurnal :

Aditya Surya Permana. 2015. *Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik Terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol.2 No.3

Adli Hasanuddin, Pelaksanaan Sistem Kaderisasi Partai Golkar di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. Jurusan Ilmu Pemerintahan Kampus Bina Widya